

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN  
PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di bidang Kependudukan, dipandang perlu dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1964 tambahan lembaran Negara Nomor 2688 );

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat II Lampung Barat;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penye- rahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggara- an Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1998 tentang Kriteria Penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 061/1098/SJ Tanggal 7 Mei 1999 Perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 06/DPRD-LB/Kep.D/1999 Tanggal 19 Oktober 1999 tentang Persetujuan Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- e. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- j. Pola Organisasi Pendaftaran Penduduk adalah besaran susunan organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Barat yang disusun berdasarkan beban tugas;
- k. Pendaftaran Penduduk adalah Kegiatan Pendaftaran/Pencatatan data penduduk beserta perubahannya;

- l. Data Kependudukan adalah Kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari Pendaftaran Penduduk;
- m. Pemberian Akta Penduduk adalah Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Penerbitan Kutipan Akta Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk lainnya;
- n. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan Pencatatan Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam;

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk berdasarkan Pola Minimal.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

### Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Lampung di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk.

### Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Pembuatan rencana umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga;
- e. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
- g. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan;
- h. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian;
- i. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;
- j. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- k. Pencatatan mutasi penduduk;
- l. Pengelolaan data penduduk;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan;
- n. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pendaftaran Penduduk;
- o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
  - d. Seksi Pelayanan Pencatatan;
  - e. Seksi Data dan Laporan;
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai-mana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi;

- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- e. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

#### Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Pendaftaran

www.djpp.depkmham.go.id

#### Pasal 11

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk;
- e. pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk.

#### Pasal 13

Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan kartu Keluarga;

- b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan Kartu Keluarga.
- (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mutasi data penduduk.

#### Bagian Keempat Seksi Pelayanan Pencatatan

#### Pasal 15

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pelayanan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

www.djpp.depkmham.go.id

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- f. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri;
- g. Pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

## Pasal 17

Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian;
- c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan.

## Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian di luar negeri ;
- (2) Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan dan pengesahan anak, Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian di luar negeri ;
- (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan mutasi data kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

www.djpp.depkmham.go.id

## Bagian Kelima Seksi Data dan Laporan

## Pasal 19

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pengelolaan data dan laporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi:

- a. Penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Penyiapan bahan, pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. Pembuatan data statistik dan laporan data serta pemberian layanan informasi;
- f. Pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

- g. Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

#### Pasal 21

Seksi Data dan Laporan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengolahan Data;
- b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan;
- c. Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan.

#### Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan Bahan Pengumpulan, Pemeriksaan, Perumusan Sistem, Penganalisa dan Pengaplikasian, Penyiapan dan Pengolahan Data Pencatatan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- (2) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas pokok serta penyusunan grafik statistik data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta Laporan Data Penduduk;
- (3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan Bahan Pengendalian dan Pengawasan, serta Melaksanakan Penyuluhan dan Pemberian Layanan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

### BAB V CABANG DINAS

www.djpp.depkumham.go.id

#### Pasal 23

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pendaftaran Penduduk yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

#### Pasal 24

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di satu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk di wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- c. Penyusunan data pendaftaran dan pencatatan penduduk dan pemberian informasi kependudukan;
- d. Penyusunan laporan pelaksana tugas Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk.



#### Pasal 26

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Urusan Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana :
  - Sub Seksi Pelayanan Pendaftaran;
  - Sub Seksi Pencatatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

#### Pasal 28

Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

#### Pasal 29

UPTD dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas dan UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas dan fungsi Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk yang berada pada Kantor Catatan Sipil dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten dihapus dan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk.

### Pasal 35

- (1) Tata cara Pelaksanaan atau hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Bupati harus memberitahukan segala Keputusan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 19 Oktober 1999

**BUPATI LAMPUNG BARAT**

**WAYAN DIRPHA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 1999 NOMOR 124**